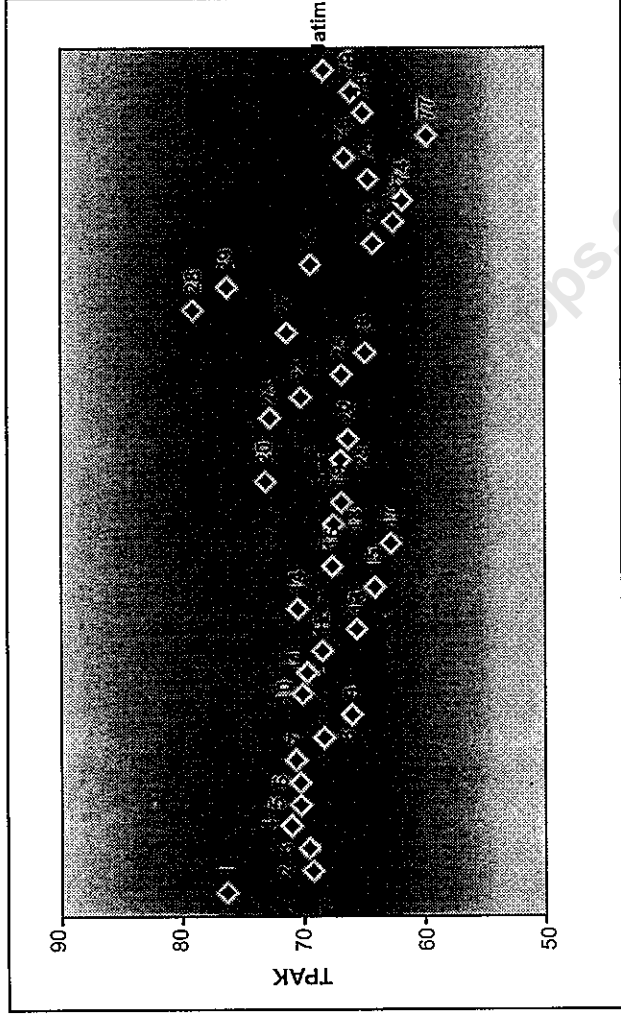


LAPORAN EKSEKUTIF
KEADAAN ANGKATAN KERJA
DI JAWA TIMUR
2003-2004



KATA PENGANTAR

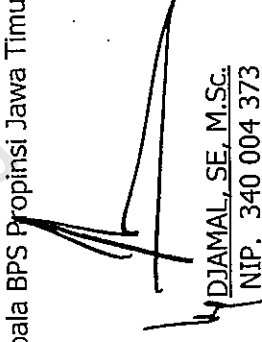
Laporan eksekutif tentang Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2003-2004 merupakan salah satu publikasi tentang ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS Jawa Timur. Laporan ini memuat ulasan ringkas dan indikator ketenagakerjaan yang mengacu pada konsep *Labor Force* yang telah direkomendasikan oleh *International Labor Organization (ILO)*.

Data yang digunakan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003-2004. Susenas diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia setiap tahun.

Diharapkan informasi mengenai ketenagakerjaan yang disajikan dalam publikasi ini dapat digunakan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur dan sekaligus untuk perencanaan serta evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini, kami ucapkan terima kasih. Saran dan kritik untuk perbaikan edisi tahun berikutnya sangat kami harapkan.

Surabaya, Desember 2005
Kepala BPS Propinsi Jawa Timur



DJAMAL, SE, M.Sc.
NIP. 340 004 373

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sumber Data	1
BAB II PENDUDUK USIA KERJA	3
2.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan	3
2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	4
BAB III STRUKTUR PENDUDUK YANG BEKERJA	8
3.1 Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor	8
3.2 Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan	10
3.3 Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja	12
BAB IV JUMLAH PENGANGGURAN	14
4.1 Jumlah Pengangguran Terbuka	14
4.2 Jumlah Pengangguran menurut Pendidikan	15
LAMPIRAN	16

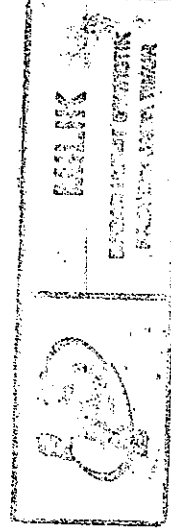
DAFTAR ISTILAH

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
TKK : Tingkat Kesempatan Kerja
Informal : Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar, dan pekerja bebas (pertanian/non pertanian)

Pengangguran : Penduduk 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja selama seminggu yang lalu. Sebelumnya, pengangguran hanya meliputi penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan.

Kode Kabupaten/Kota:

1	=	Kab. Pacitan	20	=	Kab. Magetan
2	=	Kab. Ponorogo	21	=	Kab. Ngawi
3	=	Kab. Trenggalek	22	=	Kab. Bojonegoro
4	=	Kab. Tulungagung	23	=	Kab. Tuban
5	=	Kab. Blitar	24	=	Kab. Lamongan
6	=	Kab. Kediri	25	=	Kab. Gresik
7	=	Kab. Malang	26	=	Kab. Bangkalan
8	=	Kab. Lumajang	27	=	Kab. Sampang
9	=	Kab. Jember	28	=	Kab. Pamekasan
10	=	Kab. Banyuwangi	29	=	Kab. Sumenep
11	=	Kab. Bondowoso	71	=	Kota Kediri
12	=	Kab. Situbondo	72	=	Kota Blitar
13	=	Kab. Probolinggo	73	=	Kota Probolinggo
14	=	Kab. Pasuruan	74	=	Kota Pasuruan
15	=	Kab. Sidoarjo	75	=	Kota Malang
16	=	Kab. Mojokerto	76	=	Kota Mojokerto
17	=	Kab. Jombang	77	=	Kota Madiun
18	=	Kab. Nganjuk	78	=	Kota Surabaya
19	=	Kab. Madiun	79	=	Kota Batu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi mengenai ketenagakerjaan merupakan hal penting yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial, misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Apabila perekonomian kurang dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut wilayah dan sektor, yang tentunya berguna bagi investor untuk strategi investasi dan bagi pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia.

Data ketenagakerjaan beserta indikatornya yang disajikan dalam publikasi ini meliputi jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, tenaga kerja, angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Adapun sumber data yang digunakan untuk menyusun indikator ketenagakerjaan tersebut berasal dari hasil pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003-2004.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan keadaan angkatan kerja di Jawa Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas tentang kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2003-2004 berdasarkan hasil Susenas.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan keadaan angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2003-2004 berasal dari hasil pengumpulan data melalui Susenas yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia setiap tahun. Ukuran sampel Susenas 2003 untuk Propinsi Jawa Timur sebesar 28.934 rumahtangga, sedangkan ukuran sampel Susenas 2004 sebesar 29.952 rumahtangga yang tersebar di semua kabupaten/kota.

Pengumpulan data pada rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antar petugas survei dengan responden. Petugas survei yang terdiri dari staf BPS kabupaten/kota, mantri statistik/koordinator statistik kecamatan (KSK), serta mitra statistik sebelum melaksanakan pendataan terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk memperoleh bekal pemahaman tentang konsep, definisi, serta tata cara melaksanakan survei.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB II

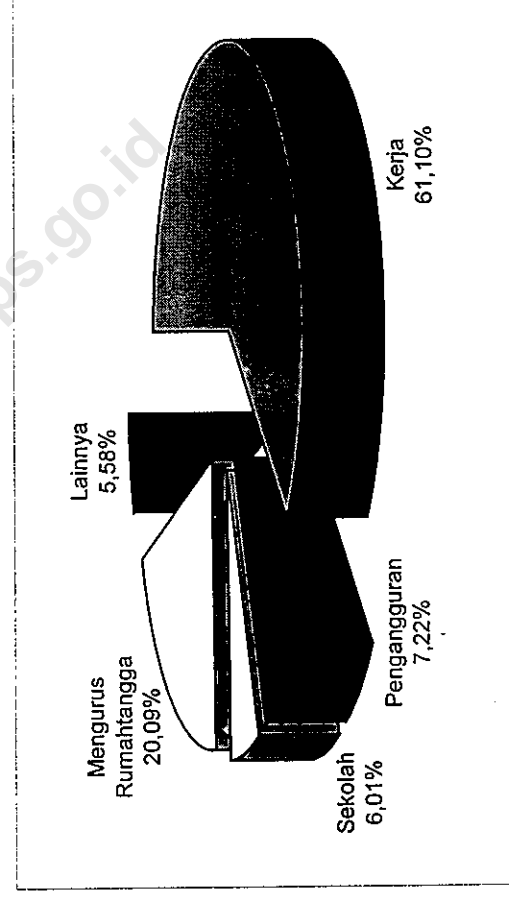
PENDUDUK USIA KERJA

Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur hingga tahun 2004 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Jawa Timur. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

2.1. Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan

Berdasarkan konsep *Labor Force*, penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang terlibat/aktif dalam kegiatan ekonomi seperti mereka yang bekerja dan pengangguran¹. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Tahun 2004



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

¹ Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan kerja, atau belum mulai bekerja

Dari data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS pada tahun 2004, di Jawa Timur terdapat 27,297 juta jiwa penduduk usia kerja. Dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada tahun 2003 sebesar 27,172 juta jiwa, berarti ada penambahan penduduk usia kerja sebesar 125 ribu jiwa dalam waktu satu tahun. Sebagian besar dari penduduk usia kerja yang ada merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi.

2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dari tabel 1, diketahui bahwa pada tahun 2004 TPAK di Jawa Timur adalah sebesar 68,32 persen yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 68 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran). Dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2003 sebesar 69,55 persen, berarti terjadi penurunan TPAK sebesar 1,23 persen.

Tabel 1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2003-2004

Kegiatan	2003			2004		
	Laki-laki (1)	Perempuan (2)	Jumlah (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)	Jumlah (6)
Angkatan Kerja	87,62	52,32	69,55	87,28	50,33	68,32
- Bekerja	81,95	45,72	63,40	80,32	42,86	61,10
- Pengangguran	5,67	6,59	6,14	6,96	7,47	7,22
Bukan Angkatan Kerja	12,38	47,68	30,45	12,72	49,67	31,68
- Sekolah	6,43	5,27	5,83	6,60	5,46	6,01
- Mengurus Rumah tangga	0,99	37,00	19,43	0,87	38,32	20,09
- Lainnya	4,96	5,41	5,19	5,25	5,89	5,58
TPAK	87,62	52,32	69,55	87,28	50,33	68,32
TKK	93,53	87,40	91,17	92,03	85,16	89,43
TPT	6,47	12,60	8,83	7,97	14,84	10,57
Jumlah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	N	13.260.849	13.911.516	27.172.365	13.290.255	14.007.252
						27.297.507

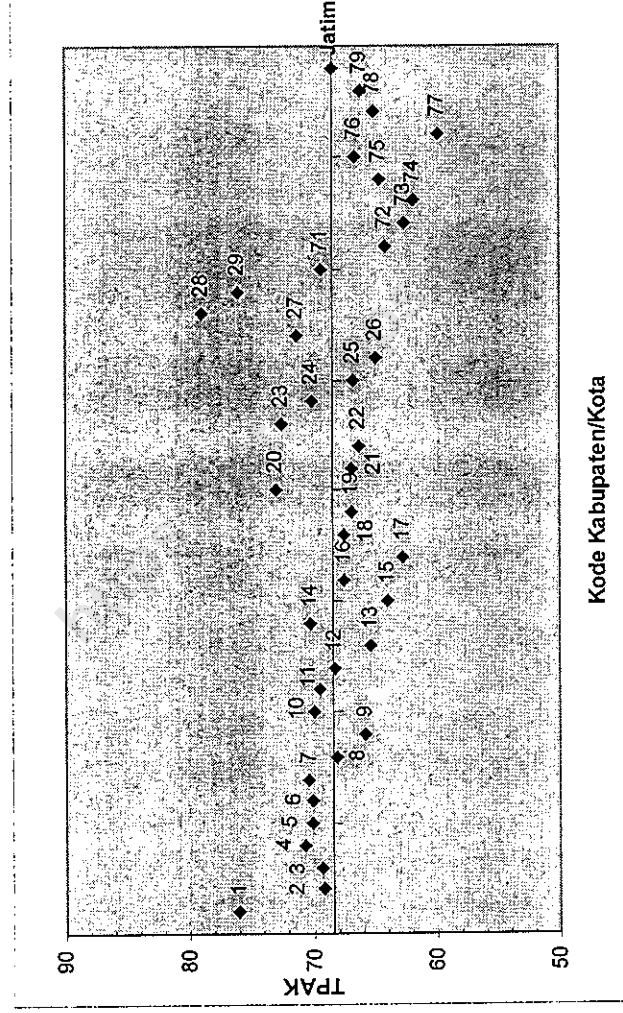
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, kegiatan terbanyak yang dilakukan penduduk laki-laki adalah aktif dalam kegiatan ekonomi khususnya bekerja, sedangkan persentase terbesar penduduk perempuan adalah bekerja dan mengurus rumah tangga. Untuk besaran TPAK, angka untuk laki-laki mencapai hampir dua kali lipat TPAK perempuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibandingkan perempuan. Hal

ini terkait dengan budaya/tradisi masyarakat kita yang umumnya menempatkan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara itu sebagian besar penduduk perempuan lebih banyak melakukan kegiatan domestik seperti mengurus rumahtangga, mengurus dan membesarkan anak. Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa dalam hal pendidikan (kegiatan sekolah), penduduk laki-laki nampaknya mempunyai kesempatan lebih tinggi dibandingkan perempuan.

TPAK menurut kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004 menunjukkan keragaman, yang bekisar antara 59,74 – 78,95. Sebanyak 16 kabupaten dan kota Kediri mempunyai angka TPAK di atas rata-rata Jawa Timur yaitu 68,32, sedangkan 13 kabupaten dan 8 kota lainnya mempunyai angka TPAK di bawah rata-rata Jawa Timur. TPAK tertinggi dicapai Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 78,95, sebaliknya TPAK terkecil terdapat di Kota Madiun yaitu sebesar 59,74.

Gambar 2. TPAK Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004



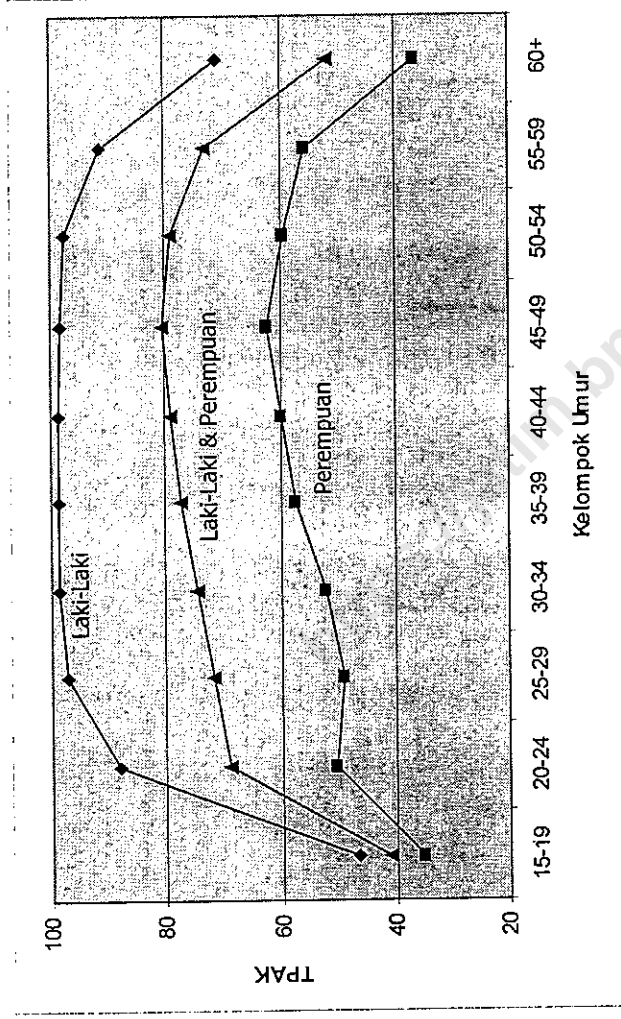
Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Dibanding tahun 2003, penurunan TPAK cukup signifikan terjadi di Kabupaten Bangkalan (-9,05 persen), Kabupaten Sampang (-8,45 persen), serta Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Lamongan masing-masing pada kisaran -4,00 persen. Sebaliknya, Kota Malang menunjukkan peningkatan TPAK yang cukup signifikan sebesar 4,43 persen.

Karakteristik lain yang dapat diamati dari variasi TPAK adalah menurut variabel umur. Di Jawa Timur pada tahun 2004, TPAK mencapai titik optimal pada kelompok

usia 45-49 tahun yaitu dengan besaran 80,44. Pada kelompok umur di atas 49 tahun, TPAK mulai mengalami penurunan hingga mencapai titik minimum yaitu sebesar 51,76 yang terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Tingginya TPAK pada kelompok umur 45-49 tahun mencerminkan bahwa penduduk pada kelompok umur tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pola TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 3.

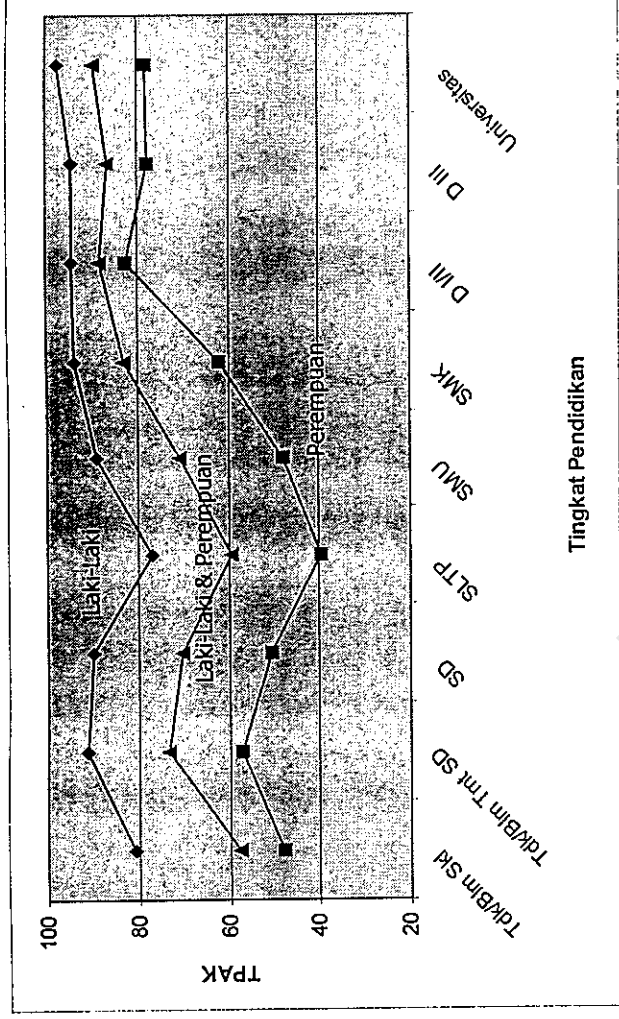
Gambar 3. TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 2004



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Secara teori tingkat pendidikan yang ditamatkan akan mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan maka TPAK cenderung akan meningkat. Pola TPAK menurut tingkat pendidikan di Jawa Timur tahun 2004 mulai meningkat pada kelompok pendidikan SLTA, sedangkan pada tingkat pendidikan di bawah SLTA polanya berfluktuasi.

Gambar 4. TPAK menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Timur Tahun 2004



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

<https://jatim.bps.go.id>

BAB III

STRUKTUR PENDUDUK YANG BEKERJA

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur, selain dengan mengamati struktur angkatan kerja, perlu juga dilakukan pengamatan terhadap struktur penduduk yang bekerja. Adanya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu nampaknya berdampak pada perubahan struktur penduduk yang bekerja baik menurut sektor maupun status pekerjaannya.

Meskipun jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya, namun jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada tahun 2004 dibanding tahun 2003. Dengan demikian Angka Beban Tanggungan Nyata (ABT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap total penduduk cenderung semakin besar. Fenomena lain yang terjadi adalah daya serap pekerja yang terbesar berada pada kegiatan informal atau kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional dan subsisten, karena umumnya rata-rata pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah.

3.1. Struktur Tenaga Kerja menurut Sektor

Menurut konsep *Labor Force*, kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi orang tua/saudara/orang lain.

Berdasarkan data Susenas 2004 yang disajikan pada tabel 1, jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur sebesar 16,679 juta atau 89,43 persen terhadap jumlah angkatan kerja yang ada, angka tersebut dalam ketenagakerjaan dikenal sebagai Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Dibanding data TKK tahun 2003 sebesar 91,17 persen, artinya terjadi penurunan sebesar 1,74 persen.

Masih tingginya angka TKK di Jawa Timur belum tentu mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, karena tingkat kesejahteraan hanya akan tercapai apabila diimbangi dengan produktivitas yang tinggi pula. Untuk mengetahui tingkat produktivitas diantaranya dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan pendapatan.

TKK menurut jenis kelamin menunjukkan sedikit perbedaan yaitu untuk tenaga kerja laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan TKK perempuan. Hal ini diduga karena kesempatan kerja yang tersedia biasanya masih bias jender, misalnya untuk sektor atau jenis pekerjaan tertentu hanya dapat diisi oleh tenaga kerja laki-laki.

Dari jumlah orang yang bekerja di Jawa Timur, selanjutnya dapat diketahui angka beban tanggungan (ABT) nyata. ABT mencapai 45,65 pada tahun 2004 dan 47,59 pada tahun 2003, artinya satu orang pekerja harus menanggung sekitar 2-3 orang penduduk. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan bagi tenaga kerja itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, apabila pendapatan yang diterima masih berada di bawah rata-rata Upah Minimum Regional (UMR).

Tabel 2. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan di Jawa Timur, 2003-2004

Lapangan Pekerjaan	2003		2004			
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-Laki (5)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
Pertanian	49,83	47,56	49,00	47,95	45,23	46,97
Industri Pengolahan	11,09	14,06	12,19	11,65	14,06	12,52
Perdagangan	13,61	25,52	18,01	14,01	25,79	18,25
Jasa Kemasyarakatan	9,99	11,17	10,43	10,42	12,97	11,34
Lainnya *)	15,47	1,69	10,38	15,97	1,95	10,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.867.418	6.360.738	17.228.156	10.675.127	6.003.941	16.679.068

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

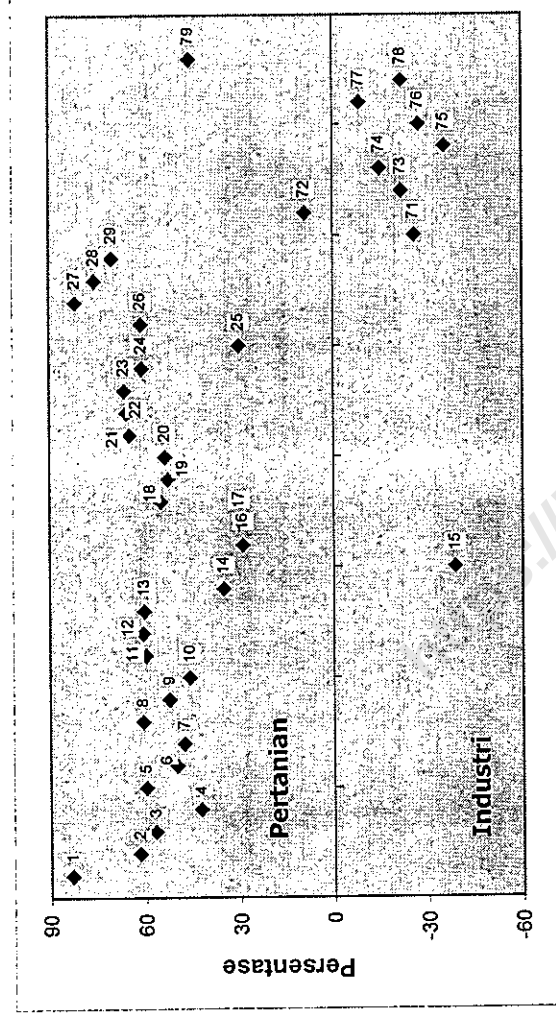
Catatan: *) Bangunan; Angkutan; Keuangan; Pertambangan; Listrik, Gas, dan Air

Berdasarkan sektor/lapangan usaha yang dikerjakan oleh penduduk, maka kondisi wilayah di Jawa Timur dikategorikan sebagai daerah agraris, karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, pada tahun 2004 sebesar 47 persen dan pada tahun 2003 sebesar 49 persen. Sektor lain yang terbesar setelah pertanian adalah perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan. Pola yang sama juga terjadi pada tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Untuk sektor perdagangan, proporsi penduduk perempuan yang bekerja di sektor tersebut (dibandingkan seluruh pekerja perempuan) hampir dua kali lipat dibanding penduduk laki-laki (dari seluruh pekerja laki-laki), yaitu sebesar 25,79 persen pada perempuan dan sebesar 14,01 persen pada laki-laki pada tahun 2004.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase terbesar tenaga kerja pada setiap sektor adalah berpendidikan rendah atau SD ke bawah, karena pendidikan

angkatan kerja yang tersedia di Jawa Timur memang masih relatif rendah. Kondisi tenaga kerja dilihat dari pendidikannya yang rendah mencerminkan rendahnya produktivitas maupun kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, apabila pendidikan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kualitas tenaga kerja.

Gambar 5. Persentase Tenaga Kerja Terbesar menurut Sektor Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2004



Sumber: ²S Propinsi Jawa Timur
Catatan: Kode Kabupaten/Kota ada pada Daftar Istilah

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2004 penyerapan terbesar pekerja di sektor Pertanian di Jawa Timur umumnya terjadi di daerah kabupaten, kecuali pada Kabupaten Sidoarjo dengan penyerapan terbesar pekerja pada sektor industri. Selanjutnya pada daerah kota, penyerapan terbesar tenaga kerja di sektor industri, kecuali Kota Blitar dan Kota Batu masih didominasi oleh sektor pertanian.

3.2. Struktur Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan

Analisis ketenagakerjaan akan lebih menarik apabila struktur tenaga kerja dikaji menurut status pekerjaan. Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Data mengenai penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Jawa Timur tahun 2003-2004 dapat dilihat pada tabel 3. Sebagaimana tahun sebelumnya, secara keseluruhan persentase penduduk yang bekerja di Jawa Timur adalah berstatus buruh/karyawan. Sedangkan status pekerjaan lain yang menonjol adalah sebagai pengusaha tanpa dibantu dan pengusaha dibantu buruh tidak tetap. Hal yang menarik adalah sebagian besar pengusaha tersebut berpendidikan

rendah atau SD ke bawah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kondisi manajemen dari perusahaan atau kegiatan usaha yang dijalankannya. Kedua status pekerjaan yang disebutkan terakhir dikenal sebagai kegiatan informal yang akhir-akhir ini semakin meningkat khususnya setelah krisis ekonomi.

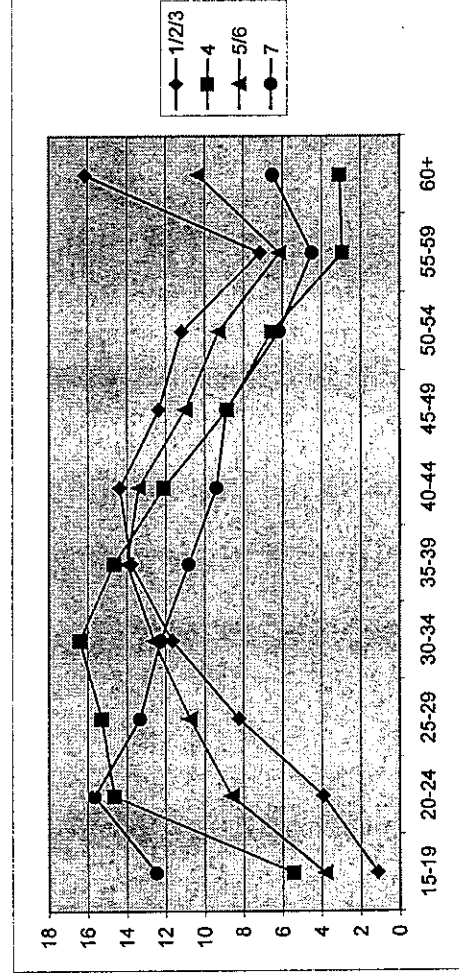
Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2003-2004

Status Pekerjaan	2003			2004		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-laki (5)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
Berusaha sendiri	20,70	19,16	20,13	21,24	19,55	20,63
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	24,06	10,86	19,19	22,51	9,97	18,00
Berusaha dibantu buruh tetap	4,96	1,45	3,67	4,57	1,69	3,54
Buruh/karyawan/pegawai	29,33	26,20	28,17	29,14	26,58	28,22
Pekerja bebas pertanian	8,28	9,10	8,58	9,55	9,36	9,48
Pekerja bebas non pertanian	3,89	1,11	2,87	4,94	1,24	3,61
Pekerja Tidak dibayar	8,78	32,11	17,39	8,04	31,61	16,52
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.867.418	6.360.738	17.228.156	10.675.127	6.003.941	16.679.068

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Jika diamati menurut kelompok umur, masing-masing status pekerjaan mempunyai pola yang berbeda. Namun secara umum pola tenaga kerja menurut status pekerjaan berbentuk huruf "U" terbalik, kecuali tenaga kerja berstatus pekerja keluarga menunjukkan pola yang cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya kelompok umur.

Gambar 6. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Jawa Timur Tahun 2004



Catatan: Kode 1/2/3 = berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap

Kode 4 = buruh

Kode 5/6 = pekerja bebas di pertanian dan non pertanian

Kode 7 = pekerja tidak dibayar

3.3. Struktur Tenaga Kerja menurut Jumlah Jam Kerja

Struktur penduduk yang bekerja di Jawa Timur menurut jam kerja dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat tingkat produktivitas pekerja di Jawa Timur. Semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu), maka semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja menurut jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) kurang dari 35 jam dalam seminggu yang sering dikenal sebagai pekerja tidak penuh; 2) lebih dari 35 jam kerja dalam seminggu atau disebut sebagai pekerja penuh.

Pada umumnya penduduk Jawa Timur bekerja di atas jam kerja normal yaitu sebanyak 60,11 persen pada tahun 2004 dan 62,72 persen pada tahun 2003. Proporsi laki-laki yang bekerja di atas jam kerja normal lebih tinggi dibandingkan perempuan.

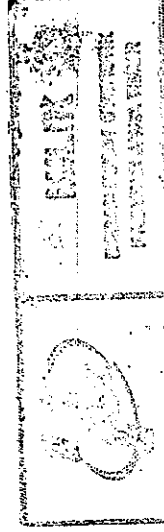
Tabel 4. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2003-2004

Jumlah Jam Kerja	2003		2004			
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-Laki Perempuan (5) (6)	Jumlah (7)	
0 *)	2,55	3,54	2,92	2,75	3,78	3,12
1-9	0,96	2,34	1,47	1,69	3,39	2,30
10-24	11,69	24,92	16,57	13,64	25,35	17,85
25-34	15,04	18,50	16,32	15,34	18,86	16,61
35-44	26,43	21,93	24,77	26,47	21,38	24,64
45-59	34,92	19,62	29,27	31,98	17,89	26,91
60+	8,41	9,15	8,68	8,13	9,35	8,57
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.867.418	6.360.738	17.228.156	10.675.127	6.003.941	16.679.068

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Catatan: *) penduduk yang sementara tidak bekerja

Jika diamati menurut kabupaten/kota pada tahun 2004, menunjukkan variasi yang cukup heterogen, yaitu terdapat 8 kabupaten/kota (Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya) dengan persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal lebih dari 75 persen. Sebaliknya masih ada kabupaten yang sebagian besar tenaga

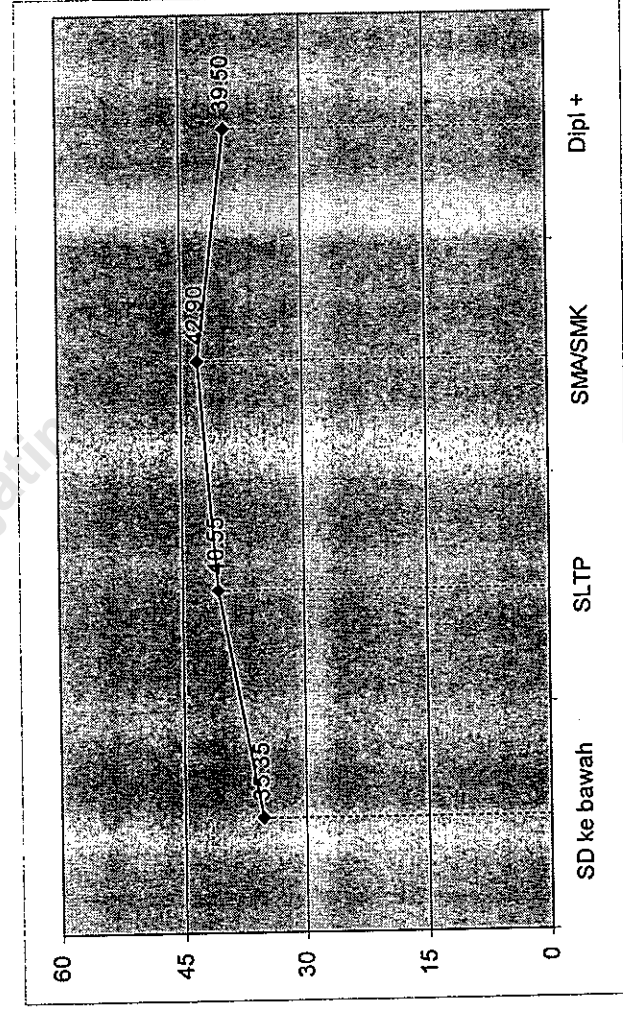


kerjanya (lebih dari 60 persen) bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Teori Human Capital menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja. Pernyataan tersebut tidak dapat dijelaskan dari gambar 7, karena rata-rata jumlah jam kerja pada mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas) cenderung menurun. Hal ini diduga karena pertama, lapangan kerja khususnya sektor modern yang bersifat *renumeratif* (menguntungkan) sangat terbatas jumlahnya, sehingga tenaga kerja terdidik yang berjumlah besar dan muncul dalam waktu bersamaan sering tidak dapat ditampung oleh lapangan kerja yang tersedia di sektor tersebut. Kedua, kenyataan umum menyatakan bahwa lulusan pendidikan belum siap untuk bekerja sesuai tuntutan lapangan kerja. Oleh karena itu, banyak usaha industri yang masih harus melatih tenaga kerja tersebut dalam waktu yang relatif lama agar mereka dapat bekerja. Ketiga, asumsi bahwa pendidikan formal mampu menyediakan tenaga kerja trampil dan mampu bekerja mungkin tidak atau kurang benar.

Gambar 7.

Rata-rata Jam Kerja Seminggu menurut Tingkat Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2004



Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

BAB IV

JUMLAH PENGANGGURAN

Salah satu data ketenagakerjaan yang banyak diminati adalah data pengangguran. Fenomena yang terjadi hingga saat ini adalah salahnya persepsi masyarakat dalam menginterpretasikan data pengangguran yang ada. Sehingga ada anggapan bahwa data pengangguran yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi riil. Secara umum konsep pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengangguran penuh (pengangguran terbuka) dan pengangguran tidak penuh. Namun demikian dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai pengangguran penuh/pengangguran terbuka.

4.1. Jumlah Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran yang diperoleh dari hasil Susenas adalah angka pengangguran terbuka atau pengangguran penuh. Angka pengangguran penuh merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding pertambahan angkatan kerja baru, menyebabkan terjadi penambahan jumlah pengangguran baru sekitar 300 ribu orang menjadi sebesar 1,971 juta pada tahun 2004. Dengan penambahan ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 10,57 persen pada tahun 2004 dibanding keadaan pada tahun 2003 sebesar 8,83 persen.

Jika diamati menurut kabupaten/kota menunjukkan adanya tujuh kabupaten/kota yang mengalami penurunan TPT. Penurunan TPT secara nyata terjadi di Kota Kediri (4,45 persen), Kabupaten Ngawi (4,08 persen), dan Kabupaten Sumenep (2,51 persen), sebaliknya terjadi peningkatan yang nyata di Kabupaten Bangkalan (6,09 persen), Kabupaten Gresik (5,28 persen), Kabupaten Bojonegoro (4,47 persen), dan Kabupaten Magetan (4,09 persen).

4.2. Jumlah Pengangguran menurut Pendidikan

Pengangguran yang terjadi di Jawa Timur nampaknya lebih banyak terdapat pada mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Hal ini disebabkan adanya keengganan dari mereka untuk memasuki dunia kerja yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya, karena kesempatan kerja di Jawa Timur lebih banyak tersedia untuk mereka yang berpendidikan rendah. Hal ini berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, yaitu pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah, semakin tinggi pendidikan orang semakin rendah tingkat penganggurannya (Borjas, 1996: 436).

Tabel 5. Persentase Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Jawa Timur, 2003-2004

Tingkat Pendidikan	2003		2004			
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)	Laki-Laki (5)	Perempuan (6)	Jumlah (7)
Tdk/Blm S1	3,25	16,37	10,46	3,63	15,33	9,84
Tdk/Blm Tmt SD	7,91	12,08	10,20	7,21	11,82	9,66
SD	23,47	24,17	23,86	21,86	25,75	23,92
SLTP	24,49	18,31	21,10	25,43	19,95	22,52
SMU	22,08	17,01	19,30	25,54	17,79	21,43
SMK	13,79	6,82	9,96	12,50	5,28	8,67
D I/II	0,78	1,10	0,96	0,53	0,82	0,68
D III	1,10	0,66	0,86	0,74	0,40	0,56
Universitas	3,12	3,47	3,31	2,57	2,87	2,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	752.156	917.098	1.669.254	924.931	1.046.148	1.971.079

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur

Persentase pengangguran yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) tahun 2004 mencapai 43,42 persen dan pada tahun 2003 mencapai 44,52 persen. Hal ini dimungkinkan karena umumnya mereka yang berpendidikan rendah ini masuk dalam sektor pertanian atau jasa yang tidak terlalu mensyaratkan keahlian atau pendidikan formal. Selanjutnya, persentase pengangguran yang terbesar terjadi pada mereka yang berpendidikan SMU/SMK sebesar 30,10 persen pada tahun 2004 dan 29,26 persen pada tahun 2003.

TPAK Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tahun 2003-2004

Kabupaten/Kota	TPAK	
	2003	2004
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	80,19	76,09
2 Ponorogo	68,89	69,08
3 Trenggalek	72,88	69,36
4 Tulungagung	73,38	70,76
5 Blitar	70,48	70,12
6 Kediri	71,64	70,03
7 Malang	68,68	70,45
8 Lumajang	72,57	68,04
9 Jember	65,70	65,85
10 Banyuwangi	72,44	69,92
11 Bondowoso	72,80	69,54
12 Situbondo	67,80	68,30
13 Probolinggo	68,67	65,34
14 Pasuruan	72,43	70,26
15 Sidoarjo	65,67	64,00
16 Mojokerto	68,35	67,46
17 Jombang	65,34	62,73
18 Nganjuk	68,32	67,49
19 Madun	65,46	66,84
20 Magetan	73,04	73,00
21 Ngawi	66,93	66,83
22 Bojonegoro	68,16	66,21
23 Tuban	73,54	72,55
24 Lamongan	74,29	70,05
25 Gresik	67,36	66,77
26 Bangkalan	73,89	64,84
27 Sampang	79,69	71,24
28 Pamekasan	75,43	78,95
29 Sumenep	76,04	76,12
Kota		
71 Kediri	66,51	69,24
72 Blitar	64,59	64,13
73 Malang	60,13	62,58
74 Probolinggo	59,69	61,82
75 Pasuruan	60,16	64,59
76 Mojokerto	64,14	66,59
77 Madiun	58,95	59,74
78 Surabaya	64,65	65,01
79 Batu	-	66,10
Jawa Timur	69,55	68,32

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

TPT Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Tahun 2003-2004

Kabupaten/Kota	TPT	
	2003	2004
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	5,10	5,64
2 Ponorogo	7,32	9,21
3 Trenggalek	6,16	8,84
4 Tulungagung	8,77	11,86
5 Blitar	7,62	9,09
6 Kediri	9,43	10,00
7 Malang	9,06	10,98
8 Lumajang	7,10	9,25
9 Jember	7,00	10,09
10 Banyuwangi	6,99	10,22
11 Bondowoso	5,67	6,26
12 Situbondo	5,63	8,59
13 Probolinggo	5,83	9,27
14 Pasuruan	9,12	10,76
15 Sidoarjo	10,61	12,31
16 Mojokerto	9,45	11,94
17 Jombang	12,28	14,52
18 Nganjuk	10,09	10,85
19 Madiun	11,34	13,84
20 Magetan	5,08	9,17
21 Ngawi	11,77	7,68
22 Bojonegoro	7,19	11,66
23 Tuban	8,54	9,17
24 Lamongan	7,32	9,34
25 Gresik	9,40	14,67
26 Bangkalan	9,52	15,61
27 Sampang	4,64	7,37
28 Pamekasan	6,78	5,98
29 Sumenep	6,26	3,74
Kota		
71 Kediri	19,71	15,27
72 Blitar	15,78	14,39
73 Malang	15,84	15,89
74 Probolinggo	10,72	13,88
75 Pasuruan	11,84	15,33
76 Mojokerto	15,30	18,04
77 Madiun	18,51	16,96
78 Surabaya	13,20	12,88
79 Batu		11,25
Jawa Timur	8,83	10,57

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur